

# DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sutia Yunanda

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

email: [sutiayunanda3@gmail.com](mailto:sutiayunanda3@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of fiscal decentralization on economic welfare and social justice in the Riau Islands Province. Fiscal decentralization, which includes economic growth, distribution of General Allocation Funds and Special Allocation Funds, is expected to increase regional autonomy in budget management so that it can accelerate local economic development and improve the quality of life of the community. In the context of the Riau Islands Province, which consists of remote islands with significant geographical challenges, the implementation of fiscal decentralization occurs in the problem of inter-regional inequality, limited access, and high distribution costs of funds. This study uses a qualitative analysis method to measure the fiscal impact on economic growth, equitable development, and increasing the Human Development Index in several districts/cities in the Riau Islands. The results of the study show that fiscal decentralization contributes to improving economic welfare in developed areas such as Batam and Tanjungpinang. However, inequality in welfare and access to basic services still occurs in remote areas such as Lingga and the Anambas Islands. The limited capacity of local governments in budget planning and supervision also hinders the optimal use of General Allocation Funds and Special Allocation Funds throughout the region. Overall, fiscal decentralization has a positive impact on economic growth and public welfare in the Riau Islands Province, but there are still challenges in realizing equitable social justice. Therefore, a more adaptive and collaborative strategy is needed between the central and regional governments to overcome geographical barriers, increase administrative capacity, and ensure equitable distribution of benefits from fiscal policies throughout the Riau Islands.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization; Economic Growth; General Allocation Funds; Special Allocation Funds.*

## PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan konteks penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, dimulai dari kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menurunkan kesenjangan antar daerah. Namun, meskipun desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan dampak positif, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan. Terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru memperparah ketimpangan fiskal antar daerah karena distribusi transfer yang tidak merata (Lewis, 2005; Fadliya & McLeod, 2010).

Desentralisasi fiskal adalah proses pendelegasian kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperhatikan kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal memainkan peran yang kompleks dalam mempromosikan keadilan sosial, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Meskipun dapat meningkatkan tata kelola lokal dan alokasi sumber daya, efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola dan kondisi sosial ekonomi yang ada. Desentralisasi fiskal telah terbukti mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di negara-negara seperti India dan Tiongkok, tempat reformasi tata kelola lokal telah dilaksanakan (Mohammad, 2023).

Keberhasilan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Negara-negara dengan tata kelola yang efektif dapat memanfaatkan desentralisasi dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan sosial. Desentralisasi fiskal memainkan peran yang kompleks dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, dengan dampak yang bervariasi di berbagai konteks (Chygryn et al., 2018).

Di Provinsi Kepulauan Riau, desentralisasi fiskal memiliki peran penting, mengingat karakteristik wilayah ini sebagai daerah kepulauan yang tersebar dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor maritim dan pariwisata. Kepulauan Riau memiliki potensi PAD yang besar dari sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, dan industri kelautan. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk mengelola sendiri pendapatannya, meskipun keterbatasan infrastruktur dan SDM masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kepulauan Riau menerima dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan. Dana ini membantu dalam pembiayaan berbagai sektor layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah di Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan memperbaiki tata kelola keuangan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana. *Good corporate governance* dalam badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi fokus dalam mendukung desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal telah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional, dengan kontribusi yang signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Azis et al., 2022).

Peningkatan kapasitas fiskal daerah telah memungkinkan perpajakan dan pengeluaran yang lebih agresif, menanggapi kebutuhan lokal dan kondisi ekonomi (Blane, 2005). Keterlibatan Masyarakat dalam peningkatan tata kelola lokal telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dapat mengarah pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena warga merasa lebih terlibat dalam proses tata kelola (Pal & Wahhaj, 2014).

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintah daerah dapat menghambat efektivitas desentralisasi fiskal. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran sering kali mengarah pada penyimpangan dana, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat. Hal ini semakin memperburuk kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan desentralisasi, daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengembangkan industri yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan karakteristik ekonominya. Misalnya, daerah maritim dapat fokus pada industri perikanan, pengolahan hasil laut, atau galangan kapal, sementara daerah dengan kekayaan tambang bisa mengembangkan industri pertambangan dan pengolahan mineral.

Kepulauan Riau memiliki kawasan khusus, seperti Batam, Bintan, dan Karimun, yang difokuskan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi memberikan pemerintah daerah kemampuan lebih besar untuk menarik investasi dengan memberikan insentif, kemudahan izin, dan infrastruktur yang mendukung. Kawasan-kawasan ini bisa mengembangkan berbagai jenis industri, seperti manufaktur, pariwisata, dan perdagangan.

Desentralisasi memungkinkan Kepulauan Riau mengembangkan sektor IKM lokal, terutama yang berbasis pada produk perikanan, kerajinan tangan, dan olahan hasil laut. Pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil serta membangun pusat distribusi yang mempermudah akses pasar.

Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan alokasi anggaran untuk barang publik lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi (Galela, 2014a).

Secara keseluruhan, desentralisasi fiskal di Kepulauan Riau bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk barang publik sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Galela, 2014b).

Desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Ini menunjukkan adanya hubungan kompleks antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan social. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan publik antara daerah kaya dan miskin, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial (Sinaga, 2023). Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Daerah dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan menyediakan layanan publik yang memadai, sehingga justru memperparah ketimpangan antar daerah (Saputra et al., 2012).

Penelitian menunjukkan korelasi positif yang kuat antara desentralisasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, di Kenya, pendapatan asli daerah dan hibah bersyarat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten (Frankline & Titus, 2024). Desentralisasi fiskal telah terbukti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara yang kurang terdesentralisasi, di mana ia dapat merangsang pertumbuhan lebih efektif daripada di negara-negara yang sangat terdesentralisasi (Suzana & Biljana, 2024).

Studi Kasus penelitian di Sumatera Barat dan Kroasia menegaskan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi, dengan pemerintah daerah yang lebih siap untuk memenuhi kebutuhan daerah (Matić, 2024; Meri & Hefrizal, 2024).

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi bersifat nonlinier. Ada tingkat desentralisasi yang optimal, di mana desentralisasi lebih lanjut dapat menghambat pertumbuhan, terutama di daerah yang lebih terdesentralisasi (Mladenovska & Tashevskva, 2024).

Implikasi yang Lebih Luas akuntabilitas dan tata kelola desentralisasi fiskal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan warga negara, yang berkontribusi pada tata kelola dan pemberian layanan publik yang lebih baik (Matić, 2024).

### Desentralisasi Fiskal dan Keadilan Sosial

Pemerintah pusat dapat mendistribusikan DAU dan DAK ke daerah-daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada daerah tertinggal agar mampu menyediakan layanan dasar yang setara dengan daerah lain. DAU berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, yang secara signifikan memengaruhi total pengeluaran mereka, khususnya dalam belanja pegawai dan modal (Zayniddinovna & Abdugarimovich, 2021). DAK dirancang untuk memenuhi kebutuhan daerah tertentu, yang memungkinkan investasi terarah yang dapat merangsang ekonomi daerah dan meningkatkan layanan publik (Zayniddinovna & Abdugarimovich, 2021).

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk membuat daerah lebih mandiri secara finansial. Ketika daerah memiliki sumber pendapatan sendiri, seperti pajak dan retribusi, mereka dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada transfer dana pusat (Prihatiningsih & Yopi Ispa, 2024).

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pemberian layanan publik dengan kebutuhan masyarakat tertentu, yang berpotensi meningkatkan akses dan kualitas. Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan dalam penyediaan layanan publik di berbagai daerah. Misalnya, daerah yang kurang berkembang atau terpencil, yang mungkin tidak dapat mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah pusat, dapat menggunakan dana daerah untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wang et al., 2024).

Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan mereka sendiri, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat (Hasan, 2014).

Dengan pemerintah daerah yang memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya fiskal, desentralisasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan warganya memiliki insentif lebih besar untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang berujung pada distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan layanan publik.

Desentralisasi fiskal juga perlu diseimbangkan dengan kebijakan pusat yang memastikan pemerataan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa pengelolaan fiskal di daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, kebijakan pusat terkait pajak dan distribusi dana harus adil dan memperhatikan kebutuhan daerah-daerah yang lebih miskin agar dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Metodologi *literature review* dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan fokus kajian. Peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian utama atau fokus spesifik yang akan dijawab melalui *review* ini, seperti misalnya tren penelitian, teori-teori yang dominan, metode yang umum digunakan, atau temuan penting dalam bidang tertentu. Penetapan tujuan ini penting agar *review* terfokus pada topik yang relevan dan tidak melebar dari lingkup yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa *literature review* komprehensif dan dapat direplikasi, peneliti menggunakan pendekatan sistematis. Hal ini mencakup penentuan kriteria yang ketat dalam memilih artikel, serta langkah-langkah seleksi yang objektif. Pendekatan sistematis ini bertujuan mengurangi bias, memastikan keakuratan data, dan memperkuat validitas hasil *review*.

### **Sumber Data dan Prosedur Pencarian**

Sumber utama dalam *literature review* adalah artikel-artikel dari basis data ilmiah seperti *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, dan basis data lainnya. Peneliti menentukan kata kunci yang relevan, yang terkait dengan topik dan variabel utama penelitian. Proses pencarian dilakukan menggunakan kata kunci tersebut dan kombinasi logika boolean (seperti AND, OR) untuk memperoleh literatur yang sesuai (Prima et al., 2024).

### **Analisis Data**

Artikel yang lolos seleksi dianalisis untuk mengidentifikasi tren, metode penelitian yang digunakan, temuan utama, serta kesenjangan dalam penelitian yang ada. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca artikel secara mendalam dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, variabel, atau kategori tertentu.

Dalam beberapa studi, untuk menganalisis data secara kualitatif. Sintesis data dilakukan dengan menggabungkan temuan dari berbagai artikel dan memberikan pandangan komprehensif tentang topik yang diteliti. Peneliti juga mencatat kontribusi masing-masing penelitian dan mengidentifikasi area yang masih kurang dieksplorasi.

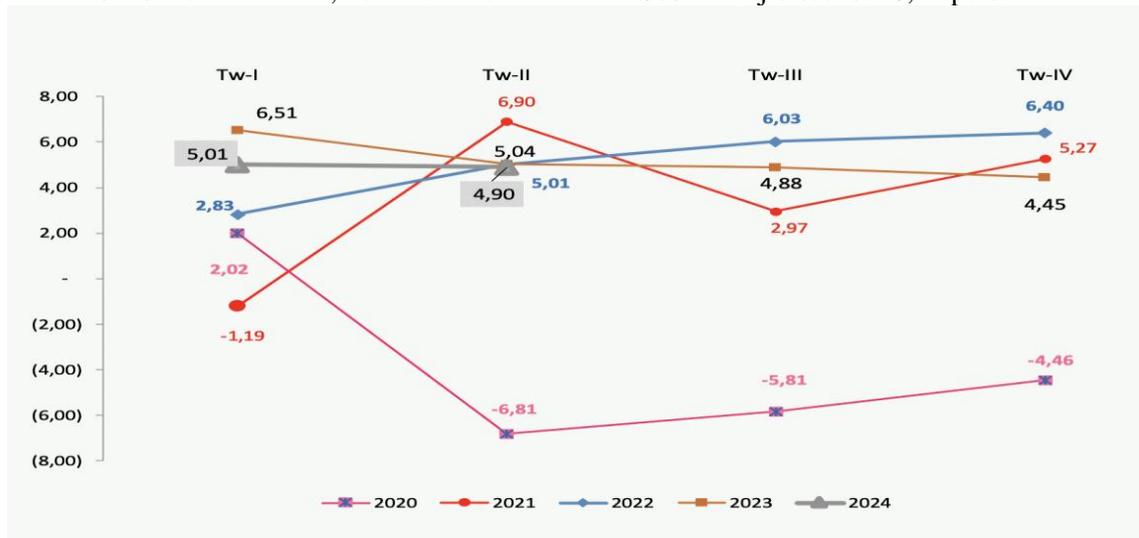
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan efisiensi alokasi sumber daya dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini memungkinkan daerah untuk fokus pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, seperti infrastruktur dan pendidikan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,90 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan II-2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan II-2024 dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 30,72 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,75 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 13,35 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2024 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 5,16 persen; diikuti Konstruksi sebesar 1,40 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,44 persen.



**Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2024 (y-on-y) (persen)**

Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, serta pariwisata. Sektor-sektor ini mendukung ekonomi Kepulauan Riau dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor pariwisata, teknologi, dan industri non-migas dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi Kepulauan Riau sebagai pusat logistik regional juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi, karena IPM memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah. IPM mengukur tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (pendapatan), yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perekonomian.

IPM berperan penting dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk ekonomi melalui peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan stabilitas sosial. Hubungan antara IPM dan ekonomi ini bersifat saling menguatkan, karena peningkatan IPM mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara ekonomi yang tumbuh juga dapat meningkatkan investasi pada pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan IPM. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau:

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	
	2022	2023
Kepulauan Riau	76,46	77,11
Karimun	72,65	73,51
Bintan	74,99	75,70
Natuna	73,47	74,21
Lingga	66,57	67,44
Kepulauan Anambas	69,61	70,26
Batam	81,67	82,11
Tanjungpinang	79,64	80,23

Tabel tersebut menunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Berikut adalah penjelasan dari data di tabel:

1. Kepulauan Riau (Provinsi): IPM meningkat dari 76,46 pada 2022 menjadi 77,11 pada 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan di provinsi ini.
2. Karimun: IPM meningkat dari 72,65 pada 2022 menjadi 73,51 pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, atau pendapatan masyarakat di Karimun.
3. Bintan: IPM meningkat dari 74,99 pada 2022 menjadi 75,70 pada 2023, yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bintan.
4. Natuna: IPM meningkat dari 73,47 pada 2022 menjadi 74,21 pada 2023. Kenaikan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Natuna.
5. Lingga: Lingga memiliki IPM yang cukup rendah dibandingkan wilayah lain, tetapi IPM-nya meningkat dari 66,57 pada 2022 menjadi 67,44 pada 2023, yang menunjukkan sedikit peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut.
6. Kepulauan Anambas: IPM meningkat dari 69,61 pada 2022 menjadi 70,26 pada 2023. Meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain, kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan positif di Kepulauan Anambas.
7. Batam: Memiliki IPM tertinggi di antara wilayah lainnya, meningkat dari 81,67 pada 2022 menjadi 82,11 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Batam memiliki kualitas hidup yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Kepulauan Riau.
8. Tanjungpinang: IPM meningkat dari 79,64 pada 2022 menjadi 80,23 pada 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat di Tanjungpinang.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peningkatan IPM di semua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2022 ke 2023, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Batam memiliki IPM tertinggi, diikuti oleh Tanjungpinang, sementara Lingga memiliki IPM terendah.

### Desentralisasi Fiskal dan Keadilan Sosial

Desentralisasi fiskal memainkan peran yang kompleks dalam mempromosikan keadilan sosial, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Meskipun dapat meningkatkan tata kelola lokal dan alokasi sumber daya, efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola dan kondisi sosial ekonomi yang ada.

**Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau**

Wilayah	2022	2023	2024
---------	------	------	------

Kepulauan Riau	6,24	5,69	5,37
Karimun	6,87	5,95	5,78
Bintan	6,44	5,90	5,44
Natuna	5,32	5,25	5,04
Lingga	14,05	11,26	9,99
Kepulauan Anambas	7,51	6,95	6,67
Batam	5,19	5,02	5,85
Tanjungpinang	9,85	7,95	6,68

Tabel diatas menunjukkan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2022 hingga 2024. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau terus menurun dari 6,24% pada 2022 menjadi 5,37% pada 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya penurunan kemiskinan secara keseluruhan di provinsi ini. Karimun mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari 6,87% pada 2022 menjadi 5,78% pada 2024, meskipun tingkat penurunannya tidak secepat daerah lain seperti Lingga. Bintan menunjukkan penurunan signifikan dari 6,44% pada 2022 menjadi 5,44% pada 2024. Ini mencerminkan keberhasilan program pengurangan kemiskinan di daerah ini. Natuna memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain, menurun dari 5,32% pada 2022 menjadi 5,04% pada 2024. Lingga adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara daerah lain pada tahun 2022 (14,05%), tetapi penurunannya cukup signifikan hingga mencapai 9,99% pada 2024. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Anambas menurun dari 7,51% pada 2022 menjadi 6,67% pada 2024. Penurunan ini terjadi secara bertahap setiap tahun. Batam mencatat sedikit peningkatan dalam tingkat kemiskinan dari 5,02% pada 2023 menjadi 5,85% pada 2024, berlawanan dengan tren di daerah lain yang menurun. Tanjungpinang mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan dari 9,85% pada 2022 menjadi 6,68% pada 2024.

Secara umum, hampir seluruh wilayah di Kepulauan Riau menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dan program pemberdayaan ekonomi yang berhasil. Namun, peningkatan di Batam pada tahun 2024 bisa menjadi tanda adanya tantangan baru, mungkin akibat faktor ekonomi lokal atau faktor eksternal lainnya.

Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Kepulauan Riau menghadapi beberapa tantangan khusus yang memengaruhi efektivitas penggunaannya dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3. Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota

(dalam ribuan rupiah)

NO.	DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA DESA	JUMLAH
1	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	238.251.189	1.129.091.346	195.771.881	648.120.860	44.437.322	-	2.255.672.598
2	KAB. NATUNA	85.516.406	403.624.512	79.205.398	45.499.218	41.587.990	66.022.285	721.455.809
3	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	71.472.986	380.489.223	80.759.510	26.322.271	65.907.002	53.152.626	678.103.618
4	KAB. KARIMUN	60.035.783	430.884.153	98.632.149	73.425.890	26.844.670	45.740.625	735.563.270
5	KOTA BATAM	130.543.540	646.918.482	125.707.695	109.723.901	24.018.361	-	1.036.911.979
6	KOTA TANJUNGPINANG	52.415.516	463.626.007	55.740.339	48.619.842	33.232.338	-	653.634.042
7	KAB. LINGGA	44.916.927	469.625.118	96.881.615	58.541.725	27.899.745	70.772.846	768.637.976
8	KAB. BINTAN	51.257.664	492.618.448	98.698.271	62.011.394	44.420.166	40.708.009	789.713.952
JUMLAH		734.410.011	4.416.877.289	831.396.858	1.072.265.101	308.347.594	276.396.391	7.639.693.244

Data alokasi anggaran tersebut menunjukkan distribusi dana untuk Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota di wilayahnya. Dengan melihat alokasi anggaran ini, kita bisa

menganalisis bagaimana dana yang dialokasikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Dengan dana besar yang dialokasikan ke beberapa pos anggaran, seperti untuk Provinsi Kepulauan Riau (Rp 2.255.672.598) dan Kota Batam (Rp 1.036.911.979), ada potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, seperti transportasi, listrik, air bersih, dan perumahan.

Infrastruktur yang memadai akan memudahkan akses masyarakat ke layanan penting, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, khususnya di daerah terpencil seperti Natuna dan Kepulauan Anambas yang membutuhkan konektivitas lebih baik.

Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menerima anggaran yang relatif besar, menunjukkan perhatian khusus pada daerah terluar. Ini penting untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan kesejahteraan masyarakat lokal, yang sering kali tertinggal dalam pembangunan. Alokasi dana di Natuna (Rp 721.455.809) dan Anambas (Rp 678.103.618) dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses ini.

Kota Batam, dengan alokasi sebesar Rp 1.036.911.979, berpotensi memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung sektor-sektor ekonomi unggulan, seperti industri dan perdagangan. Pengembangan ekonomi ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi angka pengangguran, yang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Karimun dan Bintan juga memiliki anggaran yang cukup besar, masing-masing Rp 735.563.270 dan Rp 789.713.952, yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, yang menjadi sektor unggulan daerah-daerah tersebut. Kepulauan Riau terdiri dari ratusan pulau yang tersebar luas, sehingga sulit untuk mendistribusikan dana secara merata dan efisien. Wilayah kepulauan memerlukan biaya distribusi yang lebih tinggi untuk menjangkau pulau-pulau yang jauh, terutama untuk program yang didanai oleh DAK seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, listrik). Keterbatasan akses transportasi ke pulau-pulau kecil dapat menyebabkan terlambatnya realisasi program yang didanai DAK, dan menyulitkan koordinasi antar pemerintah daerah.

Alokasi dana di Kabupaten Lingga (Rp 768.637.976) dan Bintan (Rp 789.713.952) juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi dan dukungan untuk UMKM. Program-program ini dapat membantu masyarakat di sektor informal untuk mendapatkan pelatihan, modal usaha, dan akses pasar yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM yang berkembang di sektor seperti perikanan, pengolahan hasil laut, dan kerajinan lokal akan memperkuat perekonomian masyarakat lokal, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Daerah seperti Natuna, Kepulauan Anambas, dan Karimun yang memiliki potensi alam yang besar dapat menggunakan sebagian anggarannya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan akan mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan lingkungan yang penting bagi generasi mendatang.

Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan yang baik terhadap penggunaan anggaran ini akan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penilaian penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Data alokasi anggaran ini, jika dimanfaatkan secara optimal dan diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan pariwisata, dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. Pemerataan penggunaan anggaran antara kabupaten/kota juga penting agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu tetapi juga merata hingga ke daerah-

daerah terpencil, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

Tidak semua kabupaten/kota di Kepulauan Riau memiliki kebutuhan dan kapasitas yang sama dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. DAU yang didistribusikan secara merata belum tentu mencerminkan kebutuhan masing-masing wilayah, karena ada wilayah yang membutuhkan alokasi lebih besar untuk mengatasi tantangan geografis dan ketertinggalan infrastruktur. DAK, yang seharusnya fokus pada proyek-proyek tertentu, seringkali tidak sesuai dengan prioritas atau kebutuhan utama di wilayah tertentu. Misalnya, pulau-pulau kecil mungkin lebih membutuhkan infrastruktur dasar seperti pelabuhan atau air bersih daripada fasilitas kesehatan yang memadai.

Beberapa kabupaten/kota di Kepulauan Riau mungkin memiliki kapasitas administrasi yang terbatas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan DAU dan DAK. Keterbatasan SDM dan kompetensi administrasi di daerah menyebabkan adanya hambatan dalam proses perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif atas penggunaan DAU dan DAK. Hal ini dapat mengakibatkan dana tidak terserap maksimal atau digunakan dengan kurang efektif, serta menghambat realisasi program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi DAU dan DAK sangat bergantung pada kebijakan dan peraturan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, prosedur administrasi yang panjang dan birokratis untuk mendapatkan DAK sering kali membuat proses distribusi dan realisasi dana menjadi lebih lambat, terutama untuk daerah-daerah terpencil di Kepulauan Riau.

Pemerintah pusat dan daerah seringkali memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana DAK dialokasikan dan digunakan. Beberapa program yang didanai DAK mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah di Kepulauan Riau. Misalnya, pembangunan sektor perikanan dan kelautan mungkin menjadi prioritas utama bagi daerah kepulauan, namun alokasi DAK yang diberikan lebih terfokus pada sektor lain.

Banyak pulau di Kepulauan Riau masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, listrik, dan air bersih. DAU dan DAK seharusnya dapat membantu menutup kesenjangan ini, tetapi karena alokasi yang belum mencukupi dan sulitnya menjangkau wilayah-wilayah terpencil, hasilnya belum optimal. Akibatnya, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut berjalan lambat, dan masyarakat masih sulit mengakses pelayanan dasar.

Dengan tersebarnya wilayah Kepulauan Riau, pengawasan terhadap penggunaan DAU dan DAK menjadi lebih sulit dilakukan, terutama di pulau-pulau yang sulit. Rendahnya pengawasan dan kontrol menyebabkan risiko penyalahgunaan dana atau proyek-proyek yang mangkrak. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana seringkali belum optimal, sehingga dana yang disalurkan tidak memberikan dampak maksimal pada pembangunan daerah.

Sering kali terdapat kurangnya sinergi dan koordinasi antar kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam mengelola dan memanfaatkan DAU dan DAK. Beberapa proyek yang bisa dikerjakan secara bersama untuk efisiensi, seperti pembangunan infrastruktur antar pulau, kurang mendapat perhatian karena perencanaan dan pelaksanaannya sering terpisah-pisah di setiap kabupaten/kota.

Solusi yang Dapat Dipertimbangkan:

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana serta koordinasi antardaerah, sehingga setiap wilayah dapat mengoptimalkan penggunaan DAU dan DAK sesuai kebutuhan lokal.
2. Penyusunan perencanaan berbasis kebutuhan lokal yang lebih akurat dan mendetail, agar alokasi DAK dapat disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah.
3. Pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi untuk mempermudah distribusi logistik dan akses pengawasan terhadap program-program pembangunan di daerah terpencil.

4. Pengawasan yang lebih ketat dan penerapan teknologi digital dalam pelaporan dan pengelolaan dana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Desentralisasi fiskal di Kepulauan Riau menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang baik dan kapasitas pemerintah daerah yang memadai. Namun, keberhasilan ini masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti ketimpangan antar daerah, keterbatasan kapasitas SDM di pemerintahan daerah, dan ketergantungan yang tinggi pada dana alokasi pusat.
2. Jika dipandang dari segi keberhasilan distribusi dana DAU dan DAK memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kepulauan Riau, tantangan geografis, ketimpangan alokasi, dan keterbatasan kapasitas daerah memerlukan perhatian lebih agar distribusi dana dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan efektif di seluruh wilayah provinsi ini. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau secara umum menunjukkan tren penurunan antara tahun 2022 dan 2024 di sebagian besar wilayah, yang mengindikasikan keberhasilan program-program yang didanai oleh DAU dan DAK.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Anggaran: Pemerintah pusat perlu mendukung daerah-daerah dengan sumber daya terbatas melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pelatihan dalam hal transparansi fiskal, perencanaan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya.
2. Memperkuat Kebijakan Redistribusi Fiskal: pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan redistribusi yang lebih efektif melalui peningkatan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah tertinggal. Dengan begitu, daerah-daerah yang kurang berkembang akan memiliki akses lebih besar terhadap anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang diperlukan.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah: Untuk memastikan bahwa desentralisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat membantu mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S. P. (2022). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020* (Vol. 7, Issue 2). ONLINE. [Jurnal.unimor.ac.id/JEP](http://Jurnal.unimor.ac.id/JEP)
- Blane, D. , L. (2005). Indonesian Local Government Spending, Taxing and Saving: An Explanation of Pre- and Post-decentralization Fiscal Outcomes. *Asian Economic Journal*.
- Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A., & Vorontsova, A. (2018). Assessment of fiscal decentralization influence on social and economic development. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(4), 69–84. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.5>
- Frankline, M., & Titus, M. , N. (2024). The nexus between revenue decentralization reforms and economic growth. *Public Budgeting & Finance*.
- Galela, M. R. (2014a). *DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Perlu kah desentralisasi fiskal diperluas?*
- Galela, M. R. (2014b). *DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Perlu kah desentralisasi fiskal diperluas?*

- Hasan, P. (2014). DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat) FISCAL DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT INDEPENDENCY LEVEL (Study in Districts and Cities of the Province of West Java). In *Jurnal Wacana Kinerja* ▪ (Vol. 17, Issue 2).
- Matić, R. (2024). Fiscal decentralization and impact on economic growth in the Republic of Croatia. *Zbornik Veleučilišta u Rijeci*.
- Meri, M., & Hefrizal, H. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di provinsi sumatera barat. *Scientific Journal of Reflection*.
- Mohammad, Y. (2023). *Is Fiscal Decentralization a means to Poverty and Inequality Reduction?* 111–125.
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2014). Fiscal Decentralisation, Local Institutions and Public Goods Provision: Evidence from Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2508889>
- Prihatiningsih, A., & Yopi Ispa, A. (2024). DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT DISPARITIES A NEW PERSPECTIVE IN REGIONAL ANALYSIS. *International Journal of Management and Business Economics (IJMEBE)*, 2(1), 14–17.
- Prima, A. P., Erlina, E., Sirojuzilam, & Yahya, I. (2024). GOVERNMENT REGULATION, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, AND CORPORATE PERFORMANCE. *JGP International Conference*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4777700>
- Saputra, B., Madani, S., & Mahmudi, B. (2012). *PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*.
- Sinaga, W. (2023). *ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA* (Vol. 31, Issue 1).
- Suzana, M. M., & Biljana, T. (2024). Fiscal decentralization and economic growth: Empirical evidence from European countries. *Economy Business and Development An International Journal*.
- Wang, Y., Xiuquan, H., Tao, Zhang., Bo, J., & Xi, W. (2024). Impact of fiscal decentralization and local government competition on the supply of basic public services: Based on the empirical evidence of prefecture-level cities in China. *Heliyon*.
- Zayniddinovna, B. P., & Abdugarimovich, Q. X. (2021). Directions For The Effective Use Of The Economic Potential Of The Region In Increasing The Revenues Of Local Budgets Independent Researcher-PhD. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 29(1), 218–224. <http://ijpsat.ijsh-journals.org>